

Pengaruh Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah dalam Memprediksi Status *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Hidayani Puteri^{1*}, Mayar Afriyenti²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: yani.97puteri@gmail.com

Tanggal Masuk:

21 Agustus 2024

Tanggal Revisi:

13 September 2025

Tanggal Diterima:

19 Juli 2026

Keywords: *Local*

Government Finance;

Characteristics of The

Regional Government;

Local Government

Financial Ratios; Financial

Distress.

How to cite (APA 6th style)

Putri, H., & Afriyenti, M. (2026). Pengaruh Rasio keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah dalam Memprediksi Status *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (3), 1072-1083.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i3.912>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to determine the influence of financial ratio and local government characteristics in predicting the status of financial distress in districts/cities in west sumatra province. The data in this study used secondary data processed from local government financial reports (LKPD) from the supreme audit agency of west sumatra province and population data from the central bureau of statistics of west sumatra province. The sampling technique in this study used the total sampling method with a sample of 19 districts/cities with a period of 5 years. Data analysis using multiple regression analysis. The results of this study indicate that there is one variable that has a significant effect on financial distress, namely government complexity proxied by population.

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran pendapatan daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (Indonesia) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) yang disetujui oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan disuatu daerah untuk mengurangi kesenjangan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan efektifitas terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik serta kebutuhan masyarakat di suatu daerah (Syukri, 2019).

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

pemerintah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan, potensi dan keanekaragaman daerah memberikan wewenang seluas-luasnya kepada daerah dengan pemberian hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip dari otonomi daerah, maka suatu negara mengharuskan pemerintah daerah secara terus-menerus untuk dapat berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengharuskan Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subjek Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang bersumberkan dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, yang dipergunakan untuk keperluan daerah yang bersangkutan untuk membiayai kegiatan (Badan Pusat Statistik, 2020). Pendapatan asli daerah berperan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana PAD menjadi sumber utama pendapatan suatu daerah, sebagai sumber dari pendapatan maka PAD harus digunakan sebaik mungkin dan dialokasikan sebanyak mungkin untuk alokasi belanja modal, hal ini memiliki tujuan agar pembangunan pada daerah berkembang dengan pesat dan bisa memicu pertumbuhan ekonomi, Rizal (2017).

Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, keberhasilan program ini mulai banyak dipertanyakan. Otonomi daerah yang tadinya diharapkan mampu memperbaiki masalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, justru menimbulkan masalah baru akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan.

Financial distress yang mempengaruhi pemerintah dapat mengakibatkan penurunan pengeluaran untuk pemeliharaan infrastruktur dan penurunan investasi modal yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran lain (Bumgarner et al. (1991) Jones dan Walker (2007). Pemerintah harus mampu melakukan investasi infrastruktur dan investasi di perkotaan ketika berada dalam kesulitan keuangan karena dari perspektif kota mereka adalah investasi publik, yang tercermin dalam belanja modal (Jones & Walker, 2007). Pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia anggarannya banyak didominasi transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Ketergantungan yang sangat tinggi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdampak pada kondisi keuangan APBD dipengaruhi oleh kondisi keuangan APBD. Salah satu daerah yang anggarannya banyak didominasi oleh dana transfer adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki Struktur investasi belanja modal masih di bawah 30% berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri). Hal ini sesuai dengan laporan pelaksanaan anggaran masing-masing LKPD Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Rasio keuangan yakni Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas Anggaran dan karakteristik pemerintah daerah yaitu Kompleksitas Pemerintah Terhadap *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Ruang lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masih sedikit oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggunakan ruang lingkup penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Alasan lainnya jika ruang lingkup penelitian terlalu besar maka akan sulit untuk melakukan penelitian dan hasil penelitian yang didapatkan menjadi tidak akurat

karena terlalu banyak data serta fokus penelitian menjadi tidak terarah serta waktu penelitian tidak efektif dan efisien untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan data terbaru 5 tahun terakhir yakni sejak periode tahun 2017 sampai tahun 2021. Serta penelitian ini menggabungkan variabel keuangan dan non keuangan karena saran dari peneliti sebelumnya yang hanya fokus ke salah satu variabel sehingga tidak bisa membandingkan bagaimana pengaruh variabel keuangan dan non keuangan terhadap *financial distress*.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan menggabungkan variabel keuangan dan non keuangan untuk memprediksi *financial distress*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio keuangan dan karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap *Financial Distress*. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian yaitu: “Pengaruh Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori agensi. Pada dasarnya teori keagenan menjelaskan bahwa ada hubungan yang timbul dari kesepakatan antara dua pihak, yaitu masyarakat (*principal*) yang mempercayakan tanggung jawabnya kepada pemerintah (agen) untuk memberikan pelayanan atas nama rakyat (Jensen dan Mecklenburg, 1976). Dalam teori keagenan, masyarakat dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda, dimana pemerintah (agen) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat (*principal*). (Bangun 2009, Yovita 2011) menjelaskan bahwa teori keagenan adalah teori yang mempelajari model kontrak yang mendorong agen untuk bertindak atas nama prinsipal ketika kepentingan agen mungkin bertentangan dengan kepentingan *principal*.

Financial Distress

Pada sektor pemerintahan, *financial distress* adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Salah satu standar mutu pelayanan ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal. Adapun standar mutu pelayanan berupa belanja modal adalah sebesar 30% berdasarkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Subiyanto dan Halim (2008) didalam bukunya tentang analisis investasi (belanja modal) sektor publik pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk dalam pengertian belanja modal yang didefinisikan sebagai belanja/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun.

Rasio Profitabilitas

Maulid dkk. (2018) rasio profitabilitas merupakan metrik yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hubungan ini erat kaitannya dengan kelangsungan kegiatan masyarakat. Penyesuaian rasio sektor publik dilakukan karena organisasi pemerintah bersifat nirlaba, rasio profitabilitas direvisi (d disesuaikan) dengan mengganti keuntungan (kerugian) dengan surplus (defisit) anggaran pemerintah. Surplus (defisit) yang besar menunjukkan bahwa pemerintah tidak melaksanakan anggarannya dengan baik.

Cohen (2008) menyatakan bahwa surplus yang masuk akal diperlukan untuk merealisasikan investasi jangka panjang oleh pemerintah kota, dan jumlah profitabilitas ini dapat digunakan untuk menciptakan efisiensi sumber daya dan meningkatkan pertumbuhan. Nilai rasio laba positif yang kecil dipandang lebih menguntungkan, sedangkan nilai negatif yang besar dipandang sebagai prospek keuangan yang tidak menguntungkan. Sejalan dengan

penjelasan di atas, Sutaryo (2010) menyatakan bahwa tidak seperti sektor swasta, surplus tidak berarti pemerintah kota memiliki dana yang cukup untuk membiayai pembangunan periode berikutnya.

Rasio Solvabilitas Anggaran

Menurut Ritonga (2014) *budgetary solvency ratio* atau rasio solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama satu periode laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio ini maka menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Budgetary solvency ratio merupakan perbandingan antara total pendapatan pemerintah daerah dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan. Prediksi mengenai potensi kebangkrutan sangat penting sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang selama ini terjadi. Sehingga dapat diambil suatu kebijakan untuk memperbaiki kondisi dan kinerjanya. *Financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan dana (kesulitan keuangan) yang berakibat ketidakmampuan pemerintah untuk memberi pelayanan pada publik sesuai standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan.

Kompleksitas Pemerintah

Kata “kompleksitas” berasal dari bahasa latin *complexice* yang artinya totalitas atau keseluruhan, sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik secara keseluruhan. Kompleksitas adalah kondisi dan beragamnya faktor-faktor yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi (Khasanah, 2014). Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hilmi (2011) mendefinisikan kompleksitas pemerintahan dengan menggunakan jumlah penduduk dan jumlah SKPD.

Kompleksitas pada riset akutansi pemerintahan diukur dengan menggunakan proksi populasi penduduk suatu wilayah pada periode tertentu (Ingram, 1984; Robbins dan Austin, 1986; Evans dan Patton, 1987; Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Populasi dianggap sebagai ukuran pembayaran transfer pemerintah berkaitan dengan jumlah sumber daya yang mungkin dapat disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (agen). Jadi kota dengan populasi yang lebih besar diperkirakan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik karena lebih banyak sumber daya yang dipertaruhkan (Evans dan Patton, 1987).

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Rasio Profitabilitas terhadap *Financial Distress*

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan ROA, ROE dan profit margin. Berbagai penelitian telah menunjukkan nilai yang signifikan dari rasio profitabilitas dalam melaporkan kesulitan keuangan kota. Cohen (2008) menemukan bahwa ketiga indikator di atas dapat menjelaskan efisiensi keuangan pemerintah daerah Yunani dan Sutaryo *et al.* (2012) menggunakan metrik tersebut untuk memprediksi kesulitan keuangan.

Berdasarkan teori agensi, Pemerintah sebagai *agent* dituntut untuk dapat transparan dalam menjalankan tugasnya, sehingga masyarakat sebagai *principal* dapat terus mengetahui kondisi keuangan dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Adanya analisis rasio profitabilitas ini, Masyarakat bisa melihat efisiensi pemerintah dalam meningkatkan kinerja perusahaan sehingga membuat manajemen keuangan pemerintah lebih efisien dalam menekan kondisi *financial distress* kedepannya.

Jones dan Walker (2007) menggunakan *rasio profit margin* untuk menjelaskan kesulitan pemerintah daerah di Australia. Nilai rasio margin kontribusi meningkat, menunjukkan jumlah surplus pendapatan masing-masing kabupaten/kota sedemikian rupa dapat mempengaruhi keadaan kesulitan keuangan kotamadya. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: *Profit margin ratio* mempunyai kemampuan dalam memprediksi *financial distress* pemerintah daerah.

Hubungan Rasio Solvabilitas Anggaran terhadap Financial Distress

Kemampuan total pendapatan kotamadya untuk membiayai semua pengeluaran periode fiskal dapat diukur dengan rasio solvabilitas pemerintah. Rasio solvabilitas publik adalah rasio antara total penerimaan konsumsi dan pengeluaran kotamadya. Semakin tinggi kuota ini, semakin baik pendapatan daerah yang dapat membiayai pengeluaran daerah. Ritonga *et al.* (2012) mengatakan bahwa rasio ini mengukur hubungan antara pendapatan yang dapat dibelanjakan.

Teori keagenan menjelaskan keberadaan laporan keuangan yang dilaporkan oleh *agen* yaitu pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan tanggung jawabnya serta menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah harus bisa melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga pengalokasian dana dapat tepat sasaran untuk meningkatkan total penerimaan daerah secara maksimal dan mampu membiayai pengeluaran daerah seminimal mungkin agar bisa menurunkan *financial distress* disaat ini dan masa yang akan datang.

Rasio solvabilitas adalah metrik untuk mengukur kesehatan pemerintah dari sisi kemampuan pemerintah membiayai pengeluaran daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin mampu pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah, termasuk pengeluaran daerah yang membawa manfaat jangka panjang yang dapat dinikmati masyarakat luas. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio solvabilitas keuangan publik, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa:

H2: Rasio Solvabilitas Anggaran berpengaruh negatif terhadap prediksi Financial Distress pemerintah daerah.

Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap Financial Distress

Kompleksitas dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan sejumlah manusia atau masyarakat yang bertimpal tinggal atau menetap pada sebuah daerah, berkewajiban dalam memenuhi peraturan daerah tersebut serta, memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan publik sehingga memperoleh kesejahteraan. Mahayani dan Gayatri, (2017), jumlah penduduk mampu untuk memoderasi pengaruh kemandirian keuangan dan level *of capital outlay* terhadap *financial distress*.

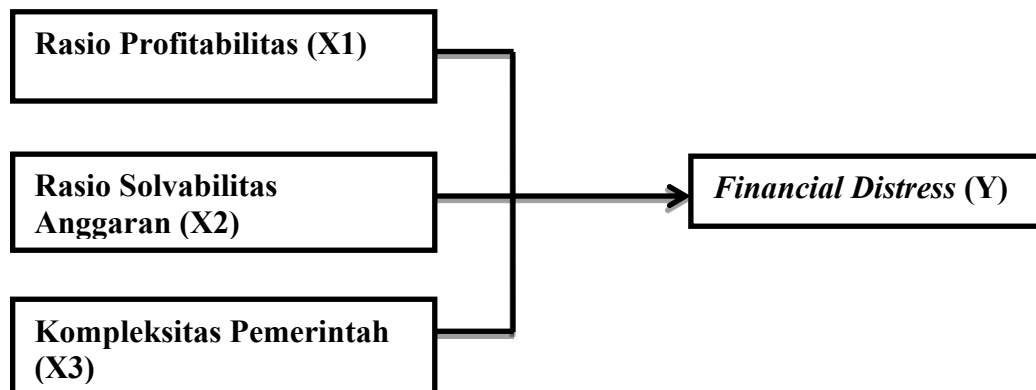
Teori keagenan (*agency theory*) sebagai hubungan antara *principal* (masyarakat dan DPRD) dan *agent* (pemerintah). Teori agensi memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agents* bagi masyarakat (*principals*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri karena memiliki informasi lebih. Pemerintah sebagai *agents* dituntut untuk dapat transparan dalam menjalankan tugasnya, sehingga masyarakat dapat terus mengetahui kondisi keuangan dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Populasi penduduk merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jumlah penduduk yang besar, dapat berkontribusi dalam penerimaan pendapatan daerah. Namun, kenyataan yang terjadi dengan banyaknya jumlah penduduk, pemerintah tidak

mampu untuk memenuhi sumber dayanya sendiri dalam membiayai biaya operasionalnya dan menurunkan tingkat ketergantungan pada organisasi lain. Syurmita (2014) menjelaskan bahwa semakin banyak penduduk di suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat pelayanan publik yang harus diberikan, maka hal ini dapat menggambarkan aktivitas pemerintah dan menghindari tanda-tanda kebangkrutan. Berdasarkan hal tersebut dan penjelasan dalam kajian teori dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kausatif. Penelitian kausatif yaitu penelitian yang menganalisis pengaruh antara suatu variabel terhadap variabel lainnya (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menjelaskan pengaruh *profitability ratio*, *budgetary solvency ratio* dan kompleksitas pemerintah terhadap *financial distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 Kabupaten/Kota dengan jumlah 95 data yang di dapat dari LKPD tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data yang dianalisis yaitu data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari situs Rangkang Data BPK Sumbar dan BPS Provinsi Sumbar melalui internet.

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan diperoleh data mengenai Total Pendapatan, Belanja, Aset dan Ekuitas sedangkan dari BPS akan diperoleh data Jumlah Penduduk. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dari Rangkang Data (<https://sumbar.bpk.go.id/rangkang-data/index.php>) dan Bps Provinsi Sumatera Barat (<https://sumbar.bps.go.id/>) Data tersebut berupa LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat berjumlah 19 Kab/Kota tahun 2017 sampai tahun 2021, yang terdiri dari data Total Pendapatan, Belanja, Aset dan Ekuitas sedangkan dari BPS akan diperoleh data Jumlah Penduduk. Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur melalui buku serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan hal yang ditemukan dari hasil penelitian dan memberikan informasi dilapangan serta menginterpretasikan nilai maksimum, minimum, rata-rata, *mean* dan standar deviasi dengan tujuan agar data lebih jelas dan mudah dipahami. Berikut nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi:

Tabel 1
Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>profitability ratio</i>	95	.06	.35	.1958	.06018
<i>budgetary solvency ratio</i>	95	-.16	.10	.0032	.04053
kompleksitas pemerintah	95	.87	1.25	1.0893	.08294
<i>financial distress</i>	95	52422.00	950871.00	286941.7579	213182.16439
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas, maka didapatkan informasi, sebagai berikut; Variabel *profitability ratio* yang diukur menggunakan *profit margin ratio* memiliki nilai minimum sebesar 0,06, nilai maximum sebesar 0,35, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1958 dan nilai standar deviasi sebesar 0,06018. Variabel *budgetary solvency ratio* memiliki nilai minimum sebesar -0,16 nilai maximum sebesar 0,10, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0032 dan nilai standar deviasi sebesar 0,04053. Variabel kompleksitas pemerintah yang diukur menggunakan jumlah penduduk memiliki nilai minimum sebesar 0,87, nilai maximum sebesar 1,25, nilai rata-rata (mean) sebesar 1,0893 dan nilai standar deviasi sebesar 0,08294. Variabel *financial distress* yang diukur menggunakan rasio belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 52422.00, nilai maximum sebesar 950871.00, nilai rata-rata (mean) sebesar 286941.7579 dan nilai standar deviasi sebesar 213182.16439.

Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	206783.26239227
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.108
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		1.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.216

Sumber: Data diolah tahun 2023

Tabel 2 menggambarkan nilai signifikan Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,216 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sesuai konsep uji normalitas yakni jika nilai signifikan uji Kolmogorov- Smirnov > 0,05 maka distribusi data berdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik menggambarkan tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian multikolineritas terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3
Uji Multikoloniaritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	profitability ratio	.881	1.136
	budgetary solvency ratio	.568	1.760
	kompleksitas pemerintah	.628	1.593

Sumber: Data diolah tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3 Uji Multikoloniaritas diketahui nilai *tolerance* seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 sedangkan untuk nilai VIF pada keseluruhan variabel independen mempunyai nilai VIF kecil dari 10,00 maka pengambilan keputusan dalam uji multikolineritas ialah tidak terjadi gejala multikolineritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui terjadinya varian yang tidak sama untuk variabel bebas yang berbeda. Berikut nilai signifikansi (Sig) dari hasil analisis menggunakan Glejser.

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.280	.213		1.313	.192
Profitability ratio	-.156	.227	-.076	-.687	.494
Budgetary solvency ratio	.417	.420	.137	.993	.323
Kompleksitas pemerintah	-.115	.195	-.077	-.588	.558

Sumber: Data diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil output glejser pada gambar 4 diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig) untuk variabel *profitability ratio* yang diukur menggunakan *profit margin ratio* bernilai 0,494 lebih besar dari 0,05 ($0,494 > 0,05$) artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Nilai signifikansi (Sig) untuk variabel budgetary solvency ratio bernilai 0,323 lebih besar dari 0,05 ($0,323 > 0,05$) artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Nilai signifikansi (Sig) untuk variabel kompleksitas pemerintah yang diukur menggunakan jumlah penduduk bernilai 0,558 lebih besar dari 0,05 ($0,558 > 0,05$) artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada 3 variabel independen, sehingga model regresi yang baik dapat tercapai.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1223439.695	220336.954		5.553	.000
	Profitability ratio	-339476.800	234816.094	-.143	-1.446	.152
	Budgetary solvency ratio	944992.957	434140.556	.269	2.177	.032
	Kompleksitas pemerintah	-928070.128	201773.996	-.540	-4.600	.000

Sumber: Data diolah tahun 2023

Berdasarkan Tabel 5 dapat dianalisis model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1223439.695 - 339476.800X_1 + 944992.957X_2 - 928070.128X_3$$

Keterangan:

Y = *Financial distress*

X_1 = *Profitability Ratio*

X_2 = *Budgetary Solvency Ratio*

X_3 = Kompleksitas Pemerintah

a = Konstanta

Hasil dari uji regresi berganda pada tabel 5 terlihat bahwa konstanta bernilai 1223439.695 yang menjelaskan tanpa pengaruh dari variabel independen atau variabel bebas yang terdiri dari *Profitability Ratio*, *Budgetary Solvency Ratio* dan kompleksitas pemerintah maka nilai dari *financial distress* sebagai variabel dependen atau variabel terikat adalah 1223439.695. Nilai koefisien dari variabel *Profitability Ratio* yang diukur menggunakan *profit margin ratio* adalah sebesar -339476.800 hal ini menunjukkan apabila variabel *Profitability Ratio* meningkat maka variabel *financial distress* akan turun sebesar -339476.800 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol. Nilai koefisien dari *Budgetary Solvency Ratio* adalah sebesar 944992.957 hal ini menunjukkan apabila variabel *Budgetary Solvency Ratio* meningkat maka variabel *financial distress* akan naik sebesar 944992.957 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol. Nilai koefisien dari kompleksitas pemerintah yang diukur menggunakan jumlah penduduk adalah sebesar -928070.128 hal ini menunjukkan apabila variabel kompleksitas pemerintah meningkat maka variabel *financial distress* akan turun sebesar 928070.128 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi menggambarkan seberapa mampu variabel bebas menerangkan variabel terikat. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.461 ^a	.213	.187	128565.15074

Sumber: Data diolah tahun 2023

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa *Adjusted R Square* pada tabel 6 diperoleh hasil sebesar 0,187 atau 18,7%. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya adalah sebesar 0,187 atau 18,7% berpengaruh terhadap *financial distress* sedangkan sisanya sebesar 81,3% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain.

Uji F

Uji F (simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat

Tabel 7

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	406216229336.187	3	135405409778.729	8.192	.000 ^b
	Residual	1504138816523.243	91	16528997983.772		
	Total	1910355045859.430	94			

a. Dependent Variable: Abs_res

b. Predictors: (Constant), kompleksitas pemerintah, profitability ratio, budgetary solvency ratio

Sumber: Data diolah tahun 2023

Penentuan hasil pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai Sig antara nilai yang diperoleh pada tabel annova dengan nilai Sig yang telah ditentukan yakni 0,05. Hasil uji F juga dapat dilihat dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, dimana Ftabel dapat dicari pada tabel F yang telah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 8,192 dengan probabilitas sebesar 0,00. Dimana $8,192 > 2,705$ (F hitung > F tabel) dan angka probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 (5%). Dengan demikian dapat dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengujian hipotesis pertama (H1) *profitability ratio* yang diukur menggunakan *profit margin ratio* memiliki nilai signifikan sebesar 0,152 dan t hitung sebesar -1.446 Nilai signifikan *profit margin ratio* lebih besar dari 0,05 ($0,152 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-1.446 < 1,986$. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa *profit margin ratio* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Teori keagenan menjelaskan keberadaan laporan keuangan yang dilaporkan oleh *agen* yaitu pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya dan *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan tanggung jawabnya serta menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tidak dapat membuktikan *profit margin ratio* berpengaruh terhadap *financial distress*, maka hipotesis pertama (H1) ditolak.

Pengaruh Rasio Solvabilitas Anggaran terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) *Budgetary solvency ratio* memiliki nilai signifikan sebesar 0,032 dan nilai koefisien positif sebesar 2.177. Nilai signifikan *Budgetary solvency ratio* lebih kecil dari 0,05 ($0,032 < 0,05$) dan nilai koefisien t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2.177 > 1,986$.

Teori agensi memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agents bagi masyarakat (principals) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri karena memiliki informasi lebih. Pemerintah sebagai agents dituntut untuk dapat transparan dalam menjalankan tugasnya, sehingga masyarakat dapat terus mengetahui kondisi keuangan dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Pemerintah belum dapat melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga pengalokasian dana tidak dapat meningkatkan total penerimaan daerah secara maksimal dan meminimumkan pengeluaran yang dapat menurunkan *financial distress* disaat ini dan masa yang akan datang, dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak.

Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) kompleksitas pemerintah yang diukur menggunakan jumlah penduduk memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dan t hitung sebesar -4.600. Nilai signifikan jumlah penduduk lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-4.600 < 1,986$. Hasil penelitian ini mampu membuktikan kompleksitas pemerintah yang diukur menggunakan jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*, berdasarkan teori keagenan yang menunjukkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dimana dengan banyaknya Populasi penduduk yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dapat berkontribusi dalam penerimaan pendapatan daerah, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil pengujian regresi *profitability ratio* menunjukkan bahwa nilai koefisien *Profitability Ratio* yang diukur menggunakan *profit margin ratio* adalah sebesar -1.446, maka hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil pengujian regresi *budgetary solvency ratio* menunjukkan bahwa nilai koefisien *budgetary solvency ratio* adalah sebesar 2.177, maka hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil pengujian regresi kompleksitas pemerintah yang diproksikan dengan jumlah penduduk menunjukkan bahwa nilai koefisien jumlah penduduk adalah sebesar -4.600, maka hipotesis ketiga (H3) diterima.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat agar berupaya untuk mengalokasikan belanja daerah dengan tepat, salah satunya dengan mengurangi belanja pegawai dan mengalokasikannya ke belanja modal. Hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka pelayanan kepada publik yang lebih baik. Untuk Penelitian Berikutnya agar menambah indikator non keuangan lainnya sebagai variabel independen seperti *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Atmaja, K. F. (2012). Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress. *Accounting Analysis Journal*.
- [Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat \(bps.go.id\)](http://bps.go.id)
- Carolina, V., Merpaung, E., & Pratama, D. (2017). Analisa Rasio Keuangan dalam Memprediksi Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Maratha*, 2598- 4977.
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri. (n.d.). Retrieved from Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri: www.kemendagri.go.id
- Drs. Akhirmen, M.Si. (2012). *Statistik 1 Teori dan Aplikasi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Dwijayanti, S. P. (2010). Penyebab, Dampak, dan Prediksi dari Financial Distress Serta Solusi untuk Mengatasi Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*.
- Fachrurrozi. (2013). Pengaruh ROE, SIZE, dan WEALTH Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi.
- Fatihah, & Masnun. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkan Basis Akrua Tahun 2014-2015. *Jurnal of Economics and Business*.
- Firstanto, R. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi.
- Retrieved from Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: www.djpk.depkeu.go.id
- Suhardjanto, Djoko., Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8/No.1/November 2011: 1-194.
- Sutaryo. 2010. Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan terhadap *financial Distress* Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Syurmita. 2014. Prediksi *financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok.
- Tris, Dodi (2012). Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Online). Tersedia: <http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/11/keuangan-daerah.html>.